

**ANALISIS PENGARUH *LOCAL TAXES REVENUE*, *CONSUMER PRICE INDEX*  
DAN *GINI RATIO* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE  
2015-2019 PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Magister Ekonomi ( M.E )**



**Oleh**

**ARFIAN NUR WAHID**

**NPM 1860102037**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Konsentrasi pada Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG 1442 H /2021 M**

**ANALISIS PENGARUH *LOCAL TAXES REVENUE*, *CONSUMER PRICE INDEX* DAN *GINI RATIO* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
PERIODE 2015-2019 PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapat Gelar Magister Ekonomi (M.E.)**



**Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. Erike Anggraini, SE. M.E.Sy**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG 1442 H/2021**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH *LOCAL TAXES REVENUE*, *CONSUMER PRICE INDEX* DAN *GINI RATIO* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PERIODE 2015-2019 PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH

Oleh

ARFIAN NUR WAHID

Sistem perpajakan yang baik dapat memungkinkan terlaksananya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika semua sektor mempunyai kontribusi terhadap negara untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi sehingga mampu tumbuh dan berkembang. Dalam penelitian ini digunakan *variable independent* yaitu *local taxes revenue*, *consumer price index* dan *gini ratio* sebagai stimulus penggerak perekonomian. Sedangkan pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid syariah digunakan sebagai *variable dependen* untuk melihat hasil stimulasi perekonomian yang digunakan. Variabel-variabel tersebut digunakan dalam penelitian tesis ini untuk mendapatkan hasil yang empiris terkait pertumbuhan ekonomi berbasis Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh *local taxes revenue*, *consumer price index* dan *gini ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid syariah periode 2015-2019. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu 34 pada kurun waktu 2015-2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan yang terpublikasi dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan Program *E-Views*.

Hasil penelitian ini adalah: (1) *local taxes revenue* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid Syariah periode 2015-2019.

(2) *consumer price index* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid Syariah periode 2015-2019. (3) *gini ratio* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid Syariah periode 2015-2019.

(4) *local taxes revenue*, *consumer price index* dan *gini ratio* secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif maqasyid Syariah periode 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel *local taxes revenue*, *consumer price index* dan *gini ratio* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat dalam perspektif islam. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan maqasyid syariah dapat tercapai bilamana seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama dengan struktur negara bekerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama, yaitu dengan saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga akan mudah untuk mencapai kemakmuran yaitu *Falah* dalam kehidupan bermasyarakat.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfian Nur Wahid

NPM :1860102037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul :  
**“Analisis Pengaruh *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2015-2019 Perspektif *Maqasyid Syariah*”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020  
Yang Menyatakan



ARFIAN NUR WAHID

NPM. 1860102037



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12 Labuhanratu Kedaton Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)787392

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Pengaruh *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2015-2019 Perspektif Maqasyid Syariah  
Nama : Arfian Nur Wahid  
NPM : 1860102037  
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah / Program Pascasarjana

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Pembimbing I,

Dr. Heni Noviarita, M.Si  
NIP. 1965112 0199203 2 002

Pembimbing II,

Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy  
NIP. 19790514 200302 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Tulus Survanto, MM, Akt, CA  
NIP. 19700926 200801 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
BANDAR LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12 Labuhanratu Kedaton Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)787392

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul **Analisis Pengaruh *Local Taxes Revenue, Consumer Price Index dan Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2015-2019**  
**Perspektif Maqasyid Syariah** disusun oleh: **Arfian Nur Wahid, NPM:**  
**1860102037**, program studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang  
Terbuka Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada:  
Hari/tanggal : Kamis, 6 Mei 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag** (.....)  
**Sekretaris Sidang : Hj. Mardhiyah Hayati, SP. M.S.I** (.....)  
**Penguji I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM.Akt.CA** (.....)  
**Penguji II : Dr. Heni Noviarita, M.Si** (.....)  
**Penguji III : Dr. Erike Anggraini, S.E., M.E.Sy** (.....)



## MOTTO

“Musuh terbesar dalam menggapai kesuksesan adalah penundaan dan alasan”

“Tiada alasan untuk menunda, ataupun menunda untuk sebuah alasan”

*“ be better than you were yesterday”*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta , yang penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberi dukungan sepenuh jiwa raga, memotivasi dengan nasehat- nasehat bijak dan mendoakan agar selalu ada dalam jalan yang benar.
2. Istri tercinta yang selalu menemani perjalanan dengan penuh kasih sayang hingga terselesaikanya tesis ini.
3. Seluruh keluarga besar dan berkat doa, dukungan serta senyum semangatnya, saya mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Seluruh rekan seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2018.
5. Almamater tempat saya menimba ilmu, Pasca UIN Raden Intan Lampung.

Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap ARFIAN NUR WAHID di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 1994. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Abu Na'im S.Pdi dan Ibu Suyati S.E.

1. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung pada tahun 2000 – 2006.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2006 – 2009.
3. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012.
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program D3 Perpajakan pada tahun 2012-2015.
5. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang S1 Perpajakan di Institut STIAMI (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia) pada tahun 2016-2018.
6. Dan kemudian melanjutkan pendidikan jenjang S2 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018-2020.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul ” **Analisis Pengaruh *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2015-2019 Perspektif *Maqasyid Syariah***” dapat diselesaikan, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Magister Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung .
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto,MM.Akt.CA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Dr. Erike Angraini. S.E., M.E.Sy selaku Pembimbing Tesis.
5. Dr. Heni Noviarita, M.Si selaku Penguji Utama sidang Tertutup dan Terbuka.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Keluarga Ekonomi Syari'ah terkhusus pada kelas B angkatan 2018 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di kelas dan saling berbagi pengalaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

**Penulis**

ARFIAN NUR WAHID  
NPM. 1860102037

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Pertumbuhan Klasik .....	19
B. Kebijakan Publik.....	20
C. Teori Keagenan.....	21
D. Landasan Hukum Perpajakan Daerah.....	22
E. Reformasi Perpajakan.....	22
F. Reformasi Perpajakan Daerah .....	23
G. Pertumbuhan Ekonomi .....	24
H. Local Taxes Revenue .....	27
I. Consumer Price Index .....	29
J. Gini Ratio.....	30

K. Kerangka Pemikiran .....	32
L. Hipotesis .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Penelitian .....	35
B. Definisi Operasional .....	36
C. Model Penelitian .....	42
D. Tempat dan Waktu.....	42
E. Data dan Sumber.....	43
F. Populasi dan Sampel.....	43
G. Metode Analisa Data .....	44
1. Analisis Regresi Berganda .....	45
2. Uji F .....	45
3. Uji Koefisien Determinasi .....	46
4. Uji t .....	47

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data .....	49
B. Pengujian Hipotesis.....	50
1. Asumsi Klasik .....	50
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
3. Uji Ketepatan Model	
a. Uji F .....	58
b. Uji Koefisien Determinasi .....	59
c. Uji t .....	59
C. Pembahasan .....	61
1. Hubungan Local Taxes Revenue berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif Maqasyid Syariah periode 2015-2019 .....	61
2. Hubungan Consumer Price Index berpengaruh	

<p>terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif Maqasyid Syariah periode 2015-2019.....</p> <p>3. Hubungan Gini Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif Maqasyid Syariah periode 2015- 2019.....</p> <p>4. Hubungan Local Taxes Revenue, Consumer Price Index Dan Gini Ratio Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Maqasyid Syariah .....</p>	<p>63</p> <p>63</p> <p>67</p>
<p><b>BAB V. PENUTUP</b></p>	
<p>A. Kesimpulan .....</p> <p>B. Saran .....</p>	<p>89</p> <p>90</p>
<p><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b></p> <p><b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b></p>	<p>91</p> <p>95</p>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Konsep Maqasyid Syariah .....	8
2. Tabel 1.2 Perbandingan Penerimaan Pajak & Pertumbuhan Ekonomi	9
3. Tabel 2.1 Nilai Koefisien Gini .....	32
4. Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	38
5. Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	49
6. Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	51
7. Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	53
8. Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	55
9. Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	56
10. Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	58



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	33
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dibidang perpajakan pernah dialami oleh indonesia, dimana setelah dikeluarkannya peraturan terkait reformasi perpajakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>1</sup> Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan nusantara untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kondisi di Indonesia, sehingga perpajakan yang tercipta dapat lebih efektif dan efisien yang mampu meningkatkan jumlah penerimaan Negara melalui pajak yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat publik.<sup>2,3</sup> upaya alokasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem perekonomian indonesia, sehingga pajak-pajak yang telah terkumpul dananya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya ketika *funding* dalam bidang pajak terkumpul optimal maka akan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Peraturan terkait reformasi perpajakan telah menyadarkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang ditunjukkan oleh

---

<sup>1</sup> Satya, Venti Eka dan Dewi, Galuh Prila, 'Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan' Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 tahun 2010 hlm. 75-100

<sup>2</sup> Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis Dan Eriyatno Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus) Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 16 No.1 Tahun 2012

<sup>3</sup> Abdul Rahman, Sebuah Pelajaran Dari Pelaksanaan Reformasi Pajak Di Indonesia Dan Vietnam Jurnal Borneo Administrator/Volume 13/No. 1/2017

<sup>4</sup> Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak *Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016*

adana peningkatan yang signifikan jumlah pembayar pajak dan jumlah dana penerimaan pajak melebihi target sasaran.<sup>5</sup> Perkembangan reformasi perpajakan didukung oleh adanya sistem yang menunjang dengan memperhatikan perubahan sistem informasi dan teknologi sehingga perpajakan yang ada semakin canggih dan dapat mengefisienkan sistem perpajakan di Indonesia.<sup>6</sup> Dilakukan perubahan sistem sebagai penunjang perpajakan yaitu dengan maksud untuk memudahkan user dalam rangka memfasilitasi kemudahan masyarakat dalam membayar pajak sehingga masyarakat dengan senang hati membayarkan pajak berkat kemudahan sistem yang tercipta dan pada akhirnya ini akan berdampak pada penerimaan perpajakan Negara yang dapat diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan Negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada APBN menunjukkan bahwa sumber utama yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi penerimaan pajak, oleh karena itu reformasi perpajakan ini merupakan langkah tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak tersebut.<sup>8</sup> Pelaksanaan reformasi perpajakan telah dirasakan selama 20 tahunan, dimana Reformasi ini berlangsung

---

<sup>5</sup> Ajeng Eka Farida<sup>1</sup>, Susan Novitasari<sup>2</sup>, Sita Histri Nareswari<sup>3</sup>, Musahadah<sup>4</sup>, Indrawati Yuhertiana Reformasi Perpajakan Indonesia Dan Singapura: *Lüder's Contingency Model* Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Volume 1, Nomer 2, Maret 2018 Hlm 64-86

<sup>6</sup> Risa Mayasari Dan I Made Narsa, Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No 2 Februari 2020 h.414-427 *Doi: Ttps://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I02.P11*

<sup>7</sup> Gebreegziabher S. 2018. Effects Of Tax And Government Expenditure On Economic Growth In Ethiopia. Springer, Singapore.

<sup>8</sup> Arfah Habib Saragih, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2018a

mengalami perkembangan dalam tiga fase yaitu diantaranya adalah:<sup>9</sup> Pertama, sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 yaitu terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, dimana ini berubah menjadi UU NO 34 Tahun 2000. Ketiga, diresmikannya UU RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reformasi perpajakan memiliki tujuan untuk mengoptimalisasikan penerimaan yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk distribusi pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Dilain sisi menunjukkan bahwa perpajakan yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai berbagai bentuk belanja negara yang tersusun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D) yang kemudian dikelola untuk menstimulus kegiatan perekonomian sehingga roda ekonomi baik daerah maupun nasional dapat tergerak dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Dalam islam, ada berbagai macam jenis pajak yang dibedakan berdasarkan jenis dan bentuknya sehingga secara spesifik dapat dikelola dengan maksimal. Berbeda dengan perpajakan yang saat ini berlaku di hampir seluruh negara dimana pajak dibebankan atas perindividu, pajak tersebut hampir sama fungsinya terhadap jizyah dalam islam. Namun kembali kepada tujuan akhir pemungutan pajak, ketika ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas maka pajak tersebut dapat bernilai kebaikan dan memberi manfaat untuk masyarakat. Allah telah berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan: Dasar-Dasar Perpajakan*, Kup, Pph, Ppn & Ppnbm, Pbb, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ppsp, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press

<sup>10</sup> Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016*

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ...

“...sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak merupakan kewajiban sebagai bentuk kepatuhan kepada seorang pemimpin yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan umum dan Bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran keberhasilan dari reformasi pajak yang diterapkan yaitu memiliki birokrasi yang bersih dan akuntabel, disisi lain juga menjadi lebih efektif dan efisien dan pelayanan *public* menjadi lebih berkualitas, sehingga penerapan reformasi yang telah berjalan dikatakan sukses jika tiga hal tersebut terpenuhi dimana akuntabel tersebut bersih dari adanya tindakan korupsi, prosedur perpajakan menjadi sederhana dan ringkas sehingga pembayar iuran pajak merasa terlayani dengan baik dan mudah, dan pelayanan perpajakan menjadi lebih berkualitas dimana diberi keterangan dan informasi yang jelas ketika terjadi keluhan dan lebih *responsive* terhadap permasalahan pajak oleh Negara.<sup>11</sup> Pada indikator kesatu bahwa pemerintah yang bersih dapat dicerminkan dari alokasi dana pajak untuk pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.<sup>12</sup> Sedangkan untuk indikator berikutnya bahwa pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan informasi

---

<sup>11</sup> Venti Eka Satya\* Galuh Prila Dewi, Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2010 hlm. 75 – 100.

<sup>12</sup> Arfah Habib Saragih, Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Sikap, Vol. 3 (No. 1), Tahun 2018b, Hlm 17-27

dan teknologi yang berbasis jaringan dimana digitalisasi perpajakan menjadi ciri keefektifan dan keefesienan pelayanan *public*. Aplikasi penerapan teknologi berbasis internet bisa dimanfaatkan dalam pengembangan sistem dan fasilitas dengan tujuan untuk lebih memudahkan user pembayar pajak, disisi lain bahwa media internet merupakan sarana yang sangat fleksibel dan mudah yang dapat di gunakan untuk sarana informasi pajak kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih taat pajak.<sup>13</sup>

Reformasi pajak juga dapat dikatakan berhasil ketika jumlah penerimaan pajak meningkat dan dapat dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gebreegziabher<sup>14</sup> menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung ataupun tidak langsung. akantetapi, menurut Mdanat<sup>15</sup> dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap penerimaan pajak tidak dapat dipastikan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sebab banyak factor yang akan menjadi komposisi pertumbuhan ekonomi. Sebab penerimaan pajak tidak memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai sector yang tidak produktif sehingga dana penerimaan pajak bersifat konsumtif tanpa memberi hasil. Namun dana penerimaan pajak bias memiliki konstribusi dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ketika

---

<sup>13</sup> Risa Mayasari Dan I Made Narsa, Op.Cit hal 414-427

<sup>14</sup> Gebreegziabher S, Op.Cit

<sup>15</sup> Mdanat, Metri Fayez., Et Al. 2018. Tax Structure And Economic Growth In Jordan, 1980- 2015

dana-dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang menghasilkan sehingga dapat memberi nilai tambah pada sektor yang dibiayai pajak tersebut.

Dalam penelitian ini focus pembahasan akan melingkupi yaitu :

1. *Regional Gross Domestic Product* (RGDP) yang merupakan suatu perhitungan yang selanjutnya dapat mengetahui nilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Data RGDP ini dapat diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik dalam bentuk nominal yang selanjutnya dilogaritmanaturalkan untuk keperluan pengujian analisa model.<sup>16</sup>
2. *Local Taxes Revenue* (LTR) atau Pajak Daerah yang merupakan suatu pungutan berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dalam LTR ini terdapat dua bentuk sistem pajak yaitu pajak daerah yang ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan wilayah dan pajak pusat yang dikelola dan penerimaannya diotonomikan kepada tempat tersebut. Bentuk pajak yang diterima daerah tersebut dapat berupa *permanency* pajak kendaraan bermesin, bea perubahan pemilik kendaraan bermesin, pajak dari bahan penggerak mesin, dan lain-lain.<sup>17</sup> Untuk dapat mengakomodasi sumber data pajak wilayah dalam tesis ini, data berupa Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang digunakan

---

<sup>16</sup> BPS, 2018. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah

<sup>17</sup> BPS, 2018. Pendapatan Negara ( Pajak dan non pajak ) Jakarta: Indonesia

berupa *statistics* nominal yang selanjutnya dilakukan logaritmanatural untuk kepentingan uji model riset ini.

3. *Consumer Price Index* (CPI) dimana didalam tesis ini adalah sebagai variabel kontrol. Indeks ini sering dipakai dalam riset yang menjelaskan variabel determinan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. Dalam CPI ini akan berkaitan langsung dengan inflasi yang merupakan kecenderungan peningkatan harga bahan pokok dan/atau jasa secara umum dalam waktu yang cukup lama.<sup>18</sup> Kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan nilai mata uang yang berlaku menjadi turun sehingga *durability* dapat diartikan bahwa inflasi ini menjadi salah satu penyebab turunnya nilai uang pada barang dan jasa secara universal, sebab pada dasarnya indeks ini merupakan ukuran untuk perhitungan inflasi. CPI sendiri adalah suatu indeks yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata angka perubahan pada harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perolehan angka pada indeks ini merupakan penggambaran inflasi *longevity* atau deflasi pada barang atau jasa dimana data CPI dalam kajian ini didapatkan dari website BPS.
4. *Gini Ratio* (GR) atau koefisien gini yaitu suatu alat untuk mengkalkulasi tingkat ketimpangan distribusi penduduk. Hal tersebut berdasarkan pada penggunaan kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva yang menggambarkan keluaran kumulatif secara perhitungan merupakan perbandingan antara

---

<sup>18</sup> BPS, 2018. Indeks Harga Konsumen

distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika perolehan Rasio Gini menunjukkan angka 0 maka dapat diartikan sebagai pemerataan sempurna, sedangkan jika Rasio Gini bernilai 1 maka telah terjadi adanya ketimpangan sempurna. Dalam penelitian tesis ini *unstable* Gini Ratio merupakan variabel kontrol.<sup>19</sup>

Beberapa variabel tersebut diatas akan dibahas dalam perspektif maqasyid syariah yaitu seberapa besar nilai kesejahteraan secara islami dapat dirasakan oleh kaum muslimin dan lainnya yang ada di Indonesia. Disisi lain bahwa maqasyid syariah akan menawarkan sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana yang telah tergambar dalam Al-Quran dan Hadist. Riset ini mengaplikasikan teori *maqashid syariah* yang didasarkan pada Abdul Majid Najjar, yang telah berusaha menyediakan sebuah pandangan terkait *maqashid syariah* yang lebih komprehensif dan efektif dengan adanya pembagian 4 objektif dan 8 elemen seperti yang digambarkan pada Tabel 1.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> BPS, 2018. Kesejahteraan diukur melalui Gini Rasio

<sup>20</sup> edoui, M. H. E. 2012. Shari'a-based Ethical Performance Measurement Framework. *Chair for Ethics and Financial Norm*. Universite Paris

**Tabel 1.1**

Konsep *Maqashid Shariah* Menurut Abdul Majid Najjar

Tujuan Kunci	Akibat
(i) Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia	a. Iman b. Hak Asasi Manusia
(ii) Mengamankan Diri Manusia	a. Diri Sendiri Kecerdasan b.
(iii) Mengamankan Masyarakat	a. Keturunan b. Entitas Manusia
(iv) Mengamankan Lingkungan	a. Harta b. Lingkungan Hidup

**Tabel 1.2 Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Dan  
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2015-2019**

Tahun	Penerimaan Pajak (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	8,2	4,8
2016	3,6	5,05
2017	4,6	5,1
2018	13,0	5,17
2019	8,2	5,1

Sumber Data BPS yang diolah tahun 2020<sup>21</sup>

Merujuk pada data diatas bahwasanya pendapatan pajak akan memberi pengaruh terhadap perkembangan ekonomi indonesia, meskipun penerimaan pada saat perhitungan tidak langsung memberi pengaruh terhadap perekonomian namun besarnya penerimaan pajak tersebut akan memberi dampak terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang terbentuk pada masing-masing variable penelitian ini terhadap konsep maqasyid Syariah terlihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya jasmaniah yang terjaga namun dari sisi rohaniah juga memperoleh perlindungan atas keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan maqasyid Syariah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terjamin oleh negara, tidak didapati suatu penderitaan atas suatu kebijakan tertentu, atau peraturan yang dikeluarkan tidak menindas Sebagian masyarakat dan memberi keuntungan bagi kelompok tertentu. Sehingga pertumbuhan yang terjadi semata-mata untuk ditujukan oleh masyarakat untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan yang ini menunjukkan bahwa arti sebuah Falah. olehkarena itu pertumbuhan ekonomi yang terjadi merefleksikan keadaan yang ada dimasyarakat.

Ketika pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan peraturan dalam hal ini tentang perpajakan, maka peraturan tersebut diperuntukan untuk menambah tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mengeksploitasi dan bahkan mengintimidasi masyarakatnya.<sup>21</sup> Sehingga peraturan pemungutan pajak yang sesuai Syariah atau didasarkan pada maqasyid Syariah akan mengutamakan asas kebermanfaatn ummat, dimana pungutan ini akan dilaksanakan semata-mata untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, sehingga ada imbal hasil yang dapat diperoleh

---

<sup>21</sup> Teja, Muhammad,' Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir' Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1 tahun 2015 hlm 63- 76.

oleh masyarakat dari pemerintah atas pemberian pajak tersebut, meskipun sifat pajak adalah wajib.

Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat atau mengalami pertumbuhan ekonomi Ketika masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya atau dengan kata lain pemerintah menjamin atas kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masyarakat tersebut ada yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang terjadi belum mampu merepresentasikan kondisi dilapangan. Tingkat inflasi yang menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli kebutuhannya maka indek harga konsumen yang terjadi tidak sesuai dengan maqasyid Syariah, dimana indek harga konsumen ini juga menjadi indikator perekonomian atau tingkat kesejahteraan ekonomi pada masyarakat.

Kondisi dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya maka tingkat kesejahteraan yang terjadi memberi arti semu. Ketika pertumbuhan ekonomi dinyatakan meningkat sedangkan banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tentu ini akan menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dimana sebagian masyarakat akan hidup mewah dan tentunya terhindar dari kata kesusahan hidup, sedangkan pada kelompok masyarakat lain hidup dalam penderitaan kemiskinan. Tentu ini tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio gini mendekati angka nol. Dalam situasi seperti ini ini sangat berbea dengan asa maqasyid Syariah dalam pertumbuhan ekonomi . Sehingga kesejahteraan yang sejatinya adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua, oleh karena itu semua masyarakat merasa Makmur dengan kondisi kehidupannya.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Adriansyah<sup>22</sup> yang menunjukkan bahwa terdapat tumbuhnya perekonomian dan pendapatan pajak yang positif, namun pertumbuhan penerimaan pajak tidak menumbuhkan perekonomian (yang diukur dengan pertumbuhan PDB). Di sisi lain, Soli, Harvey, dan Hagan<sup>23</sup> juga memberi simpulan bahwa penerimaan pajak pada sektor perdagangan mancanegara berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun penerimaan perpajakan dari sektor lain tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan Jalata menemukan dalam penelitiannya bahwa pajak yang diterima dari PPN memiliki berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.<sup>24</sup> Sementara itu, Stoilova<sup>25</sup> yang mempelajari struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa menyimpulkan bahwa pajak pada sektor barang konsumsi, PPh, dan PPnBM mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Adkison dan Mohammad<sup>26</sup> yang mengkaji terkait struktur pajak negara dan pertumbuhan ekonomi selama Resesi Hebat, dengan pengambilan sampel di lima puluh negara pada periode 2004-2010, yang menghasilkan bahwa penerimaan pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bahkan pada saat resesi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya dampak yang diberikan oleh penerimaan pajak terhadap perekonomian Indonesia baik daerah maupun di level nasional. Sedangkan untuk indeks harga konsumen

---

<sup>22</sup> Adriansyah, Benny Gunawan. 2014. Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. Badan Kebijakan Fiskal Vol 18, No 1, Maret 2014.

<sup>23</sup> Soli, V.O., Harvey, S.K., & Hagan, E. 2010. Fiscal policy, private investment and economic growth: the case of Ghana. *Studies in Economics and Finance* Vol. 25 No. 2, 2010 pp. 112- 130. Emerald Group Publishing Limited. DOI 10.1108/10867370810879438

<sup>24</sup> Jalata, D. M. 2014. The role of value added tax on economic growth of ethiopia. *Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156161

<sup>25</sup> Stoilova, Desislava. Op.Cit

<sup>26</sup> Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu. 2014. Tax structure and state economic growth during the Great Recession, *The Social Science Journal*, Volume 51, Issue 1, 2014, Pages 79-89, ISSN 0362-3319, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>.

sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana perekonomian suatu daerah akan meningkat manakala tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan juga meningkat yaitu dengan meningkatnya angka konsumsi suatu daerah tertentu. Tidak hanya pajak yang akan mempengaruhi perekonomian namun kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi atas suatu barang tertentu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana ketika konsumsi meningkat pada suatu daerah tertentu maka *output* yang berupa barang maupun jasa yang harus diproduksi juga akan meningkat, saat output yang diproduksi naik maka input yang dibutuhkan juga akan meningkat sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pergerakan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai produk domestik bruto, dimana PDB disini digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Indeks harga konsumen naik maka secara otomatis akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina<sup>27</sup> yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan indeks harga konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan maka digunakan rasio gini untuk menunjukkan seberapa besar ketimpangan yang terjadi dimasyarakat. Gini rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tertentu, dimana Ketika skor ketimpangan itu rendah, maka tingkat kesejahteraan yang terjadi di masyarakat juga besar dan kesejahteraan masyarakat ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang sedang terjadi. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh besar-kecilnya nilai rasio gini. Sebagaimana

---

<sup>27</sup> Karlina, Berlian, ' Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2011-2015, Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol 6 no 1 tahun 2017

penelitian Nina dan Rustariyuni<sup>28</sup> yang menganalisis terkait pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan, berdasarkan hasil analisis yang dituangkan berupa jurnal tersebut menyebutkan bahwa rasio gini mempunyai efek positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada riset terdahulu yang menghasilkan gambaran umum, bahwa APBN dari sumber pajak berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontinuitas penerimaan pajak akan memastikan pertumbuhan ekonomi baik dalam keadaan resesi sekalipun. Penelitian yang membahas tentang *maqashid syariah* telah banyak dilakukan, namun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *maqashid syariah* masih terbatas pada lingkup perpajakan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, termasuk yang dilakukan oleh Mohammad dkk.<sup>29</sup> Yang memformulasikan pengukuran yang berfungsi untuk mengukur kinerja dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah *maqashid* dengan tujuan bahwa ada pengukuran di bidang perpajakan yang cocok untuk tujuan. Dalam pembahasan ini, konsep syariah yaitu *maqashid* dikemukakan oleh A.M Najjar digunakan peneliti, dimana konsep ini menggunakan indikator komprehensif, yang memberikan kesempatan penulis untuk mengeksplorasi lebih rinci peran atau pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di mencapai *Falah*. Mengacu pada uraian latar belakang tersebut diatas bahwa penulis ingin membuktikan secara empiris data yang kemudian menghasilkan kesimpulan tentang pengaruh umum Pajak Pendapatan Daerah, Indeks Harga Konsumen dan Gini Ratio

---

<sup>28</sup> Nina, Gek Ayu dan Rustariyuni, Surya Dewi, pengaruh gini rasio, pengeluaran non makanan dan belanja modal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di propinsi bali, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Vol 18 no 2 tahun 2018

<sup>29</sup> Mohammed, M. O. and F. M. Taib. 2010. Testing the Performance Measured Based on *Maqashid Framework Shariah (PPMS)*. Model on 24 Selected Islamic and Conventional Bank. Dipublikasikan. Paper. *International Islamic University of Malaysia (IIUM)*

Terhadap perspektif Syariah Maqasyid Pertumbuhan Ekonomi untuk periode 2015-2019. Hal ini menjadi penting untuk studi karena dapat menilai efektivitas reformasi pajak daerah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan memahami konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya persentase signifikansi pengaruh penerimaan pajak wilayah, perubahan harga, dan pemerataan distribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia dalam kajian maqasyid syariah.<sup>30</sup> Disisi lain bahwa dalam praktik dilapangan menunjukkan selama lima tahun terakhir (2015-2019) pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan nominal, dan bahkan terjadi peningkatan jumlah tagihan yang harus dibayar, sedangkan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut justru mengalami goncangan ekonomi yang begitu besar dengan ditunjukkannya fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung kearah penurunan atau terjadi ketidakkonsistenan antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Pada sisi lain juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada interval waktu 2015-2019 juga sangat tinggi pada tahun antara 2015-2016 yang mencapai sekitar 7-8 %.<sup>31</sup> Akan tetapi ditahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa tingkat inflasi selalu mengalami penurunan, sehingga indeks harga konsumen juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan layak hidup juga mulai meningkat, namun tingkat

---

<sup>30</sup> Mutia, Evi Dan Nastha Musfirah, Pendekatan *Maqashid Shariah Index* Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (*Maqashid Sharia Index Approach As Performance Measurement Of Sharia Banking In Southeast Asia*), Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Volume 14 Nomor 2, Desember 2017

<sup>31</sup> BPS, 2019 Indeks Harga Konsumen tahunan.

pertumbuhan ekonomi tidak seiring dengan membaiknya capaian indeks harga konsumen yang terjadi selama periode penelitian tersebut.

Ditinjau dari aspek kesejahteraan yang dapat digambarkan oleh kurva lorenz atau gini ratio menunjukkan bahwa angka ketimpangan semakin mendekati satu yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat mengalami penurunan. Namun dalam beberapa tahun di rentang waktu penelitian menunjukkan bahwa tingkat perekonomian yang terjadi masih mengalami stagnasi bahwa cenderung menurun, keadaan tersebut memposisikan pertumbuhan Indonesia berada pada middle trade income atau jebakan ekonomi menengah dimana Indonesia memasuki jebakan pertumbuhan yang stagnan dan akan sulit untuk tumbuh ke angka berikutnya. Salah satu kontribusi dari penelitian ini yaitu menambah hasanah keilmuan yang membahas pendapatan pajak dan wilayah pertumbuhan ekonomi di negara itu dengan memberikan bukti empiris selama periode penelitian, memberikan masukan dan evaluasi bagi para pemangku kepentingan baik dalam perpajakan dan pemerintah mengenai efektivitas reformasi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dan menekankan pentingnya yang berkontribusi terhadap pendapatan masalah tersebut digunakan pajak untuk kegiatan dana atau proyek-proyek yang produktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sesuai dengan perspektif Islam yang merupakan tujuan dari syariah tercapai untuk ummat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan bahwa penelitian ini akan membahas *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Rasio* yang akan dianalisis dengan variabel terikat yaitu

pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi focus penelitian karena peneliti akan meninjau factor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variable independent yang telah dipilih penulis. Sehingga kajian tesis ini akan membahas sebagai berikut yang di tuangkan dalam bentuk rumusan masalah untuk memberi bukti empiris keterkaitan variable.

1. Apakah *Local Taxes Revenue* berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019?
2. Apakah *Consumer Price Index* berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019?
3. Apakah *Gini Ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019?
4. Apakah *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019?
5. Apakah *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019 dalam perspektif Maqasyid Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk membahas seberapa besar pengaruh *Local Taxes Revenue* terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.

2. Untuk membahas seberapa besar pengaruh *Consumer Price Index* terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.
3. Untuk membahas seberapa besar pengaruh *Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.
4. Untuk membahas seberapa besar pengaruh *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.
5. Untuk membahas seberapa besar pengaruh *Local Taxes Revenue*, *Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019 dalam perspektif Maqasyid Syariah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Landasan Teori

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat yang luas. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat teori-teori dari para tokoh ekonomi diantaranya:<sup>32</sup>

##### 1. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan GNP yang persisten, yang ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi dan bukan oleh kekuatan- kekuatan di luar sistem. Perilaku aliran modal negara-negara berkembang (dari negara miskin ke negara kaya) turut memicu konsep pertumbuhan endogen. Untuk menggambarkan pendekatan pertumbuhan endogen, akan dibahas pertumbuhan endogen Romer. Romer dikenal sebagai pakar pertumbuhan ekonomi dan pernah menjadi salah satu kandidat penerima Nobel di bidang ekonomi. Bidang kajian yang menarik perhatian Ramer adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan perspektif yang lebih luas. Ramer memasukkan komponen teknologi

---

<sup>32</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 55

endogen hasil penelitian dan pengembangan (*research & development*) dan ilmu pengetahuan ke dalam model pertumbuhannya.<sup>33</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Romer menyajikan sebuah kerangka teori yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi dibidang ilmu pengetahuan. Model Romer ini menganggap ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk modal. Ilmu pengetahuan merupakan suatu input terpenting dalam proses produksi. Hanya berkat ilmu pengetahuan orang dapat menciptakan metode baru dalam berproduksi sehingga memperoleh keuntungan ekonomi dan ilmu pengetahuan yang ada sekarang tercipta karena adanya inovasi serta perbaikan dimasa lalu.

Lebih jauh lagi, Romer menekankan bahwa teknologi dan ilmu mengatakan merupakan faktor penentuan cepat atau lambatnya laju perekonomian suatu negara. Teori ini dengan jelas menggambarkan tentang bagaimana akumulasi modal tidak mengalami *diminishing returns*, namun justru akan mengalami *increasing returns* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang SDM dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 91

## 2. Teori Ekonomi Klasik

Dalam sejarah pemikiran ekonomi para penulis ekonomi pada bagian kedua abad ke-18 dan permulaan abad ke-20 lazim digolongkan sebagai kaum Klasik. Kaum Klasik itu sendiri di bedakan atas dua golongan yaitu Klasik dan Neo-Klasik. Tokoh yang termasuk kedalam golongan Klasik diantaranya adalah Adam Smith, David Ricardo,<sup>34</sup> Robert Malthus, dan John Stuart Mill.<sup>35</sup> Ahli-ahli ekonomi Klasik dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan mempunyai pandangan yang agak berbeda antara satu dengan yang lain.

Pandangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Tulisan tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.<sup>36</sup> Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi dan mengenai corak proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif.

---

<sup>34</sup> Menik Fitriani Safari, *Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia...* hal. 12

<sup>35</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga..., hlm. 433-437.

<sup>36</sup> Sadono, Sukirno. *EKONOMI PEMBANGUNAN: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan...* hlm.243

Pandangan Ricardo dan Mill bertentangan dengan pandangan Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis, mereka memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang akhir dari proses pembangunan dalam jangka panjang. Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state* yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Menurut pandangan para ekonom klasik terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi.<sup>37</sup> Akan tetapi, dalam teori klasik ini, para ahli ekonomi menempatkan penambahan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pandangan bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti di sini pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus-menerus.

Mereka menggambarkan, apabila jumlah penduduk sedikit, dan kekayaan alam relatif berlebihan (banyak), maka tingkat pengembalian modal dari investasi yang dihasilkan tinggi, sehingga di sini para pengusaha akan mendapatkan keuntungan besar, yang akan menciptakan investasi baru, dan pada akhirnya akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika pertumbuhan penduduknya terlalu banyak,

---

<sup>37</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, ... hlm. 433

maka penambahan penduduk tersebut akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk menjadi negatif, kemakmuran masyarakat menurun, dan tingkat pertumbuhan ekonomi akan rendah.

a. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa seorang pengusaha memegang peranan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dinilai sebagai golongan yang secara terus-menerus akan melakukan pembaharuan dan inovasi dalam kegiatan ekonomi yang akan menciptakan investasi baru, meliputi barang-barang baru, meningkatkan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pangsa pasar, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, serta pengadaan perubahan-perubahan dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan.

Berangkat dari pendapatnya tersebut, Schumpeter memberikan gambaran peran pentingnya para pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha yang memiliki keinginan atas pengadaan pembaharuan akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Dan investasi yang baru akan meningkatkan kegiatan perekonomian.

b. Teori Harrod-Domar

Teori ini melihat pertumbuhan dari sisi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku ketika pengeluaran

agregat, melalui kenaikan investasi bertambah secara kontinu pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Harrod-Domar memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa syarat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, yaitu:

- 1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh
- 2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional
- 3) Rasio modal-produksi nilainya tetap
- 4) Perekonomian terdiri dari dua sektor

Analisis mereka menunjukkan bahwa meskipun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal telah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun periode selanjutnya. Atau dengan kata lain, investasi yang ada pada tahun tersebut akan menambah kapasitas barang modal pada tahun atau periode berikutnya.

#### c. Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik, teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Mereka menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, dan faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi menurut Solow ialah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh penambahan modal dan penambahan tenaga kerja.

#### d. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936. Dalam bukunya Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat keatas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara.<sup>25</sup> Selain menerangkan faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara dan keadaan yang menciptakan berbagai masalah, analisis makroekonomi juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan.<sup>38</sup>

##### 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga

---

<sup>38</sup> Sadono, Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga...* hlm. 7

- 2) Investasi perusahaan-perusahaan
- 3) Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah
- 4) ekspor

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kapasitas ekonomi peningkatan dalam jumlah memproduksi barang dan/atau jasa dari satu periode ke periode berikutnya. Pengukuran pada pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menghitung nilai dari produk domestik bruto. menurut BPS bahwa produk domestik territorial bruto adalah jumlah dari nilai tambah bruto (nilai tambah bruto) yang muncul dari semua sektor ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai tambah dari kombinasi faktor-faktor produksi dan bahan baku dalam expositions produksi. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi (yield) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto meliputi komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Dengan demikian, dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor tadi, akan mendapatkan Produk Domestik Bruto.

Untuk mendapatkan perhitungan pertumbuhan ekonomi maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_t} \times 100 \%$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

Y	= Pertumbuhan ekonomi
PDRB t	= produk domestic regional bruto tahun sekarang PDRB
t-1	= produk domestic regional bruto tahun sebelumnya

#### 4. *Local Taxes Revenue (LTR).*

Adalah pungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan. pajak daerah dapat dibagi menjadi dua kategori: pajak daerah ditetapkan oleh peraturan daerah dan manajemen pajak negara didelegasikan ke daerah. penerimaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor biaya move judul, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Information LTR dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam bentuk ostensible dan divalidasi untuk menguji model penelitian. Selain itu, penggunaan teori perpajakan, **teori Davey** adalah bahwa sistem pajak yang baik dapat memungkinkan terwujudnya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Lincoln Arsyad merupakan expositions dimana pemerintah daerah dan masyarakat menjadi sumber daya yang ada dan menjalin kemitraan yaitu pemerintah daerah dan swasta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di daerah.<sup>39</sup>

Indikator untuk mengukur potensi pajak daerah berdasarkan davey ada 4 models dalam penilaian potensi pajak daerah, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Makalew, et.al,' Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon', *Jurnla Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 13 No. 2 tahun 2018 hlm. 57-67

<sup>40</sup> Ibid

a. Kecukupan dan elastisitas kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi tuntutan yang sama dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan premise pajak mengembangkan otomatis. Sebagai contoh: karena ada inflasi akan ada kenaikan harga, juga akan ada peningkatan populasi dan peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini elastisitas memiliki dua dimensi, yaitu:

- 1) Pertumbuhan potensial dari premise pajak itu sendiri.
- 2) Sebagai kenyamanan untuk mengumpulkan pertumbuhan pajak.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil pendapatan selama beberapa tahun dengan perubahan indeks harga, penduduk dan pendapatan nasional per kapita (GNP).

b. Keadilan Prinsip keadilan dimaksud disini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah harus ditanggung oleh semua kelompok masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kemampuan masing-masing kelompok.

c. Kemampuan Administrasi Kemampuan administratif sebagaimana dimaksud di sini menyiratkan bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menentukan dan mengumpulkan pajak sebanding dengan hasil yang dapat dicapai.

d. Perjanjian Politik perjanjian politik diperlukan dalam pengenaan pajak, penentuan struktur tarif, penentuan siapa yang harus dibayar dan bagaimana pajak ditentukan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.<sup>40</sup>

## 5. *Consumer Price Index (CPI).*

CPI atau indeks harga konsumen (CPI) adalah variabel kontrol dalam penelitian ini. CPI telah banyak digunakan dalam penelitian yang menjelaskan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di wilayah/negara. Inflasi adalah kecenderungan untuk meningkatkan harga barang dan jasa secara umum yang sedang berlangsung. Jika harga barang dan jasa dalam meningkatkan negara, inflasi maka akan meningkat.<sup>41</sup> Kenaikan harga barang dan jasa ini menyebabkan penurunan nilai uang. Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Salah satu indeks untuk mengukur inflasi IHK.<sup>42</sup>

CPI merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga secara berkala. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Informasi CPI dalam riset ini diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik. Selain itu, angka pada besaran IHK digunakan untuk audit mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (rumah tangga). IHK sering digunakan untuk survey mengukur tingkat inflasi suatu gatra dan likewise sebagai pertimbangan untuk audit penyesuaian gaji, upah, uang pensiun dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK pada masa depan, ekonom menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk audit membuat produknya.

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015. Jakarta, Indonesia

<sup>42</sup> Mankiw, G., Quah, E. & Wilson, P. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat ISBN 978-981-4384-85-8

Untuk mengukur tingkat harga pada tingkat makro, biasanya menggunakan pengukuran CPI yang juga dapat diartikan sebagai indeks harga biaya koleksi barang-barang konsumsi, yang masing-masing berbobot sesuai dengan proporsi belanja publik untuk komoditas yang bersangkutan . CPI mengukur harga untuk satu set tertentu barang (seperti makanan pokok, pakaian, perumahan, dan berbagai barang dan jasa) yang dibeli oleh konsumen. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah Badan Pusat Statistik (BPS). perhitungan CPI mulai dengan mengumpulkan harga ribuan barang dan jasa. Jika GDP mengubah jumlah berbagai barang dan jasa menjadi beberapa tunggal yang mengukur nilai produksi, CPI mengubah harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Biro Pusat Statistik berat berbagai jenis produk dengan menghitung harga dari kelompok barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. CPI adalah harga dari kelompok barang dan jasa relatif terhadap harga dari kelompok yang sama barang dan jasa pada tahun dasar.

CPI adalah indeks yang sering digunakan tetapi bukan satu-satunya indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Masih ada indeks yang dapat digunakan, yaitu Indeks Harga Produsen (IHP), yang mengukur harga dari sekelompok barang yang dibeli oleh perusahaan (produsen bukan konsumen).

Rumus untuk menghitung CPI adalah:

$$\text{IHK} = \frac{p_n}{p_0} \times 100\%$$

$P_n$  = Harga sekarang

$P_o$  = Harga pada tahun dasar

## 6. *Gini Ratio (GR).*

Rasio atau koefisien gini merupakan alat untuk mengukur derajat ketimpangan dalam sebaran penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu kurva yang membandingkan distribusi pengeluaran kumulatif dari variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi (seragam) yang mewakili persentase kumulatif populasi. Jika nilai ekuitas rasio Gini adalah 0 yang berarti sempurna, sedangkan jika rasio Gini nilai 1 berarti telah terjadi ketimpangan sempurna. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan lebih merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan lebih timpang jika koefisien Gininya hampir mendekati satu, perhatikan tabel berikut:

**Tabel 2.1 Nilai Koefisien Gini**

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0.4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Pembangunan

Permukiman Transmigrasi, rasio Gini adalah ukuran distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (desille ). Rasio Gini juga menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini karena telah banyak digunakan dalam penelitian yang meneliti faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. Information GR dalam penelitian ini diperoleh dari site Badan Pusat Statistik. Rasio Gini dapat di hitung berdasarkan rumus berikut :

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Dimana :  $f_i$  = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke  $i$ .

$Y_i$  = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke  $i$ .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

- Bila  $GR = 0$ , ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- Bila  $GR = 1$  artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

## 7. Konsep Maqasyid Syariah

Banyak peneliti yang telah mendefinisikan konsep maqasyid Syariah, namun dari penjelasan yang di berikan akan bermuara pada lima konsep dasar, dimana perlinduna jiwa, perlindungan harta, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan agama menjadi center pembahasan utamanya. Dalam perekonomian ada terobosan yang mengungkapkan perspektif yang buansa baru dalam maqasyid Syariah dimana ini di jelaskan pertama kali oleh Abdul Majid Najjar. Penjelasan terkait maqasyid Syariah dinilai lebih luas dan lebih efektif diaplikasikan dengan temuannya tersebut sebab akan di bahas dalam empat objek utama dan dibagi dalam delapan elemen khusus.<sup>43</sup> Berikut merupakan penjelasan dasar dari maqasyid Syariah :

### a. Menjaga nilai kehidupan

Dalam membangun tujuan utama ini konsep iman dan menghargai hak asasi manusia sangat di junjung tinggi. Ini di lakukan karena ini merupakan konsep dasar yang harus melekat pada setiap diri manusia, sehingga kehidupan akan menjadi lebih bernilai dengan keberadaan agama dan toleransi agama.<sup>44</sup>

### b. Menjaga diri manusia

Pada tataran kedua yang menjadi kunci kesuksesan menjaga diri manusia terletak pada diri manusia itu sendiri dan tingkat kecerdasannya. Dua hal tersebut menjadi penting untuk mencapai keberhasilan dalam rangka

---

<sup>43</sup> Bedoui, M. H. E. 2012. Shari'a-based Ethical Performance Measurement Framework. *Chair for Ethics and Financial Norm*. Universite Paris

<sup>44</sup> Mutia, Evi Dan Nastha Musfirah, Pendekatan *Maqashid Shariah Index* Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (*Maqashid Sharia Index Approach As Performance Measurement Of Sharia Banking In Southeast Asia*), Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Volume 14 Nomor 2, Desember 2017

menjaga diri manusia. Sebab manusia telah dibekali akal untuk dapat di pergunakan dalam memilah hal yang dapat bernilai manfaat untuk kehidupan.

c. Menjaga masyarakat

Dua hal yang menjadi syarat keberhasilan menjaga masyarakat yaitu terletak pada aspek keturunan dan komunitas masyarakat. Dimana ini akan membentuk sebuah karakter diri manusia yang akan memberi perubahan arah baik atau quip buruk sebuah perekonomian yang diawali oleh dua hal tersebut sebagai modular awal pembentukan jati diri manusia.

d. Menjaga lingkungan

Menjaga aspek lingkungan menjadi modular utama dalam kehidupan bermasyarakat dimana ini akan meliputi aspek kekayaan (harta) dan lingkungan hidup. Lingkungan ekonomi akan tercipta harmonis manakala harta yang ada di peroleh dengan jalan yang benar dan di distribusikan secara adil. Disamping harta, lingkungan hidup juga akan menopang aspek ekologi, sebab dengan menjaga lingkungan hidup keselarasan hidup dengan alam akan terjaga

## B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini *local taxes revenue* (X1), *consumer price index* (X2) dan *gini ratio* (X3) digunakan sebagai variable independent yang diprediksi akan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi perspektif Maqasyid Syariah (Y) yang kemudian ini digunakan sebagai

variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menggunakan pola penelitian yang hampir serupa akan tetapi memiliki perbedaan kajian dan objek penelitian serta studi kasus yang berbeda sebagaimana pada penelitian Adriansyah,<sup>45</sup> Soli et.al,<sup>46</sup> Jalata,<sup>47</sup> Stoilova,<sup>48</sup> Adkissin dan Muhammed<sup>49</sup> dan Saragih<sup>50</sup> yang meneliti tentang keterpengaruhannya variabel pajak dan variabel makro ekonomi terhadap perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mempunyai hasil yang berbeda-beda. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Sehingga skema yang terbentuk adalah seperti gambar diatas.

Hal tersebut menjelaskan bahwa Hipotesis 1 mewakili dari rumusan masalah 1 yaitu seberapa besar LTR akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, begitupun dengan hipotesis 2 yaitu CPI akan di hitung seberapa besar pengaruhnya terhadap variable pertumbuhan ekonomi dan GN juga play on words demikian, dimana variable tersebut di hitung secara parsial untuk mengetahui kekuatan variable free dalam mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan untuk hipotesis 4 merupakan hubungan simultan semua variable X terhadap variable pertumbuhan ekonomi, dan hipotesis 5 mewakili penjelasan LTR, CPI dan GN terhadap pertumbuhan

---

<sup>45</sup> Adriansyah, Benny Gunawan Op.Cit

<sup>46</sup> Soli, V.O., Harvey, S.K., & Hagan, E Op.Cit

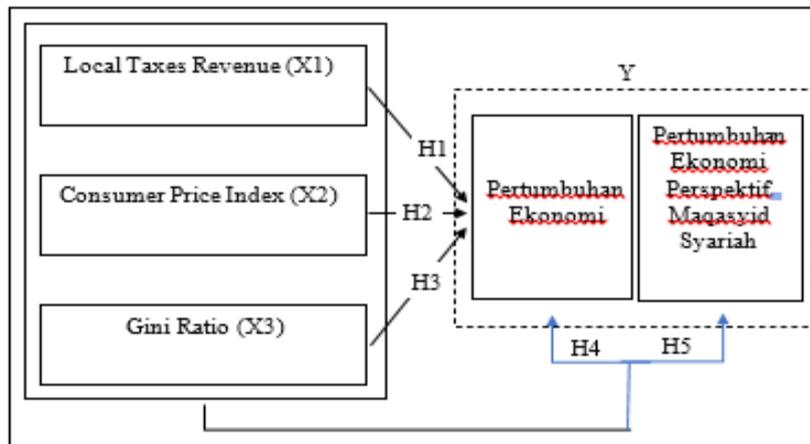
<sup>47</sup> Jalata, D. M, Op.Cit

<sup>48</sup> Stoilova, Desislava. Op.Cit

<sup>49</sup> Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu, Op.Cit

<sup>50</sup> Saragih, Arfah Habib, Op.Cit

ekonomi perspektif Maqasyid Syariah. Sehingga skema yang terbentuk adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**

### C. Hipotesis Penelitian

Penerimaan pajak daerah memiliki potensi yang cukup signifikan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dimana pungutan pajak daerah tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan memberi dampak pada perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Peneliti yang berhasil membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah memberi dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Saragih<sup>51</sup>. Sejalan dengan hasil tersebut bahwa Sihaloho<sup>52</sup> dengan menggunakan teknik analisis yaitu *time series* metode *Vektor Autoregressive* (VAR) penelitian

<sup>51</sup> Saragih, Arfah Habib, Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing Dan Perpajakan) 3(1):17 Tahun 2018 Doi: [10.32897/Jsikap.V3i1.103](https://doi.org/10.32897/Jsikap.V3i1.103)

<sup>52</sup> Sihaloho, Estro Dariatmo, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive, Forum Ekonomi, 22 (2) 2020, 202-209 [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Forumekonomi)

tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan pungutan pajak yang kemudian dananya di alokasikan untuk berbagai kepentingan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan fasilitas umum serta untuk kegiatan pengembangan usaha BUMD sehingga pada akhirnya dapat memberi pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti lain yang juga membahas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Anggarini<sup>53</sup> yang mengkaji keterkaitan pendapatan pajak terhadap pertumbuhan perekonomian daerah yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, hal tersebut juga didukung oleh beberapa peneliti yang mempunyai hasil yang serupa yaitu variabel pajak memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membentuk hubungan satu arah antara pajak dan pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Dewi dan Budhi,<sup>54</sup> Mas'Udin<sup>55</sup> Adriansyah,<sup>56</sup> Soli et.al,<sup>57</sup> Jalata,<sup>58</sup> Stoilova,<sup>59</sup> Adkissin dan Muhammed<sup>60</sup> yang meneliti tentang keterpengaruhan variabel pajak dan variabel makro ekonomi terhadap pertumbuhan perekonomian dan memiliki hasil yang positif dan signifikan

---

<sup>53</sup> Anggarini, Defia Riski. 'Pengaruh Total Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung' Jurnal TECHNOBIZ: International Journal of Business Vol. 1 No. 1 tahun 2018.

<sup>54</sup> Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah' E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 7 No. 6 tahun 2018

<sup>55</sup> Mas'Udin 'Dinamika Perubahan Ekonomi Makro dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan non-Migas' Jurnal Pajak Indonesia Vol. 1 No.1 Tahun 2017

<sup>56</sup> Adriansyah, Benny Gunawan Op.Cit

<sup>57</sup> Soli, V.O., Harvey, S.K., & Hagan, E Op.Cit

<sup>58</sup> Jalata, D. M, Op.Cit

<sup>59</sup> Stoilova, Desislava. Op.Cit

<sup>60</sup> Adkisson, Richard V., & Mohammed, Mikidadu, Op.Cit

mempunyai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitiannya.

Sedangkan peneliti lain yang mempunyai hasil yang berbeda yaitu penerimaan pajak tidak memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Monomimbar<sup>61</sup> dimana Hasil regresi menunjukkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian pajak yang tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga di temukan oleh Yuniarsih<sup>62</sup> dimana menurutnya bahwa penerimaan pajak diserah pendaannya untuk kebutuhan pembangunan namun membutuhkan durasi waktu yang cukup panjang dalam menikmati hasilnya.

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut diatas bahwa penelitian tesis ini menghipotesiskan bahwa :

**H1 *Local Taxes Revenue* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.**

Indek harga konsumen mencerminkan bahwa tingkat kekuatan konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat pada suatu kebutuhan barang atau jasa di pasar. Indeks ini juga digunakan untuk tolak ukur penetapan target

---

<sup>61</sup> Mononimbar ,Reggie W., Een N. Walewangko, Dan Jacline Sumual, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 17 No. 02 Tahun 2017

<sup>62</sup> Yuniarsih. Dwi, Panggabean. Meiran dan Suharlina. Helly ‘ Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak’ Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 3 No. 1 Tahun 2018

inflasi dalam suatu Negara, sehingga ketika indeks ini tinggi maka tingkat konsumsi pada masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya konsumsi ini akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi sebab terjadinya peningkatan permintaan atas barang yang mendorong produsen memproduksi dalam jumlah besar.

Penelitian yang menunjukkan bahwa indeks harga konsumen memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Hamdan<sup>63</sup>, Darman<sup>64</sup>, Maharani et.al<sup>65</sup>, Tulak et al<sup>66</sup> yang menyebutkan bahwa dalam hasil penelitiannya Indeks Harga Konsumen mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka Panjang maupun jangka pendek. Sedangkan pada peneliti lain mempunyai hasil yang berbeda dimana indeks harga konsumen ini tidak mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diantara peneliti tersebut dilakukan oleh Karlina<sup>67</sup> yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinotasikan oleh Produk Domestik Bruto tidak dipengaruhi oleh Indeks harga konsumen.

---

<sup>63</sup> Hamdan, ' Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi menurut indeks harga konsumen dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung' Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkal Pinang Vol. 1 No. 1 tahun 2017

<sup>64</sup> Darman, ' Analisis Ekspor-Impor dan indeks harga konsumen pada pertumbuhan ekonomi indonesia' jurnal Manajemen Indonesia. Vol 16 No 1 tahun 2016

<sup>65</sup> Maharani, Desak Putu Putri, Setiawina, Nyoman Djinar dan Purbadharmaja, I B P' Pengaruh Suku Bunga, Indeks Harga Konsumen dan Kurs terhadap jumlah kredit total dan pertumbuhan ekonomi Bali" E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 6 No.3 Tahun 2017

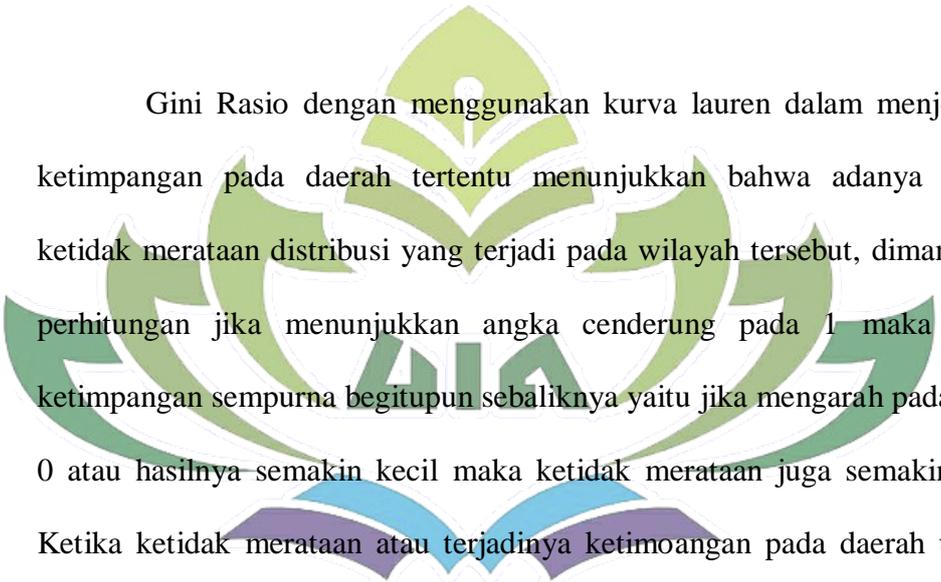
<sup>66</sup> Tulak, Dewi Yuliasuti, Junaidi dan Utami Lut Tri, " Penerapan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dalam Memodelkan Pengaruh Indeks Harga Konsumen ( IHK ) kelompok Bahan Makanan dan Kelompok Makanan jadi Terhadap Inflasi di Kota Palu" Jurnal Natural Science : Journal of Science and Technology Vol. 6 No. 3 Tahun 2017

<sup>67</sup> Karlina, Berlian, ' Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2011-2015' Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol 6 No 1 Tahun 2017

Selain itu Kurniawan dan Prawoto<sup>68</sup> juga mempunyai hasil yang serupa dimana indeks harga konsumen tidak memberi efek signifikan terhadap perekonomian.

Berdasarkan pada beberapa riset terdahulu bahwa Indeks Harga Konsumen pada tesis ini dihipotesiskan sebagai berikut:

**H2 *Consumer Price Index* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.**



Gini Rasio dengan menggunakan kurva lauren dalam menjelaskan ketimpangan pada daerah tertentu menunjukkan bahwa adanya potensi ketidakmerataan distribusi yang terjadi pada wilayah tersebut, dimana hasil perhitungan jika menunjukkan angka cenderung pada 1 maka terjadi ketimpangan sempurna begitupun sebaliknya yaitu jika mengarah pada angka 0 atau hasilnya semakin kecil maka ketidakmerataan juga semakin kecil. Ketika ketidakmerataan atau terjadinya ketimpangan pada daerah tertentu maka tingkat pertumbuhan ekonomi pun akan sulit meningkat karena terjadi masalah krusial yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut sulit bangkit.

Peneliti yang mengkaji ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu Sudarlan<sup>69</sup>, Mopangga<sup>70</sup>, Imbran dan Tone<sup>71</sup> yang menunjukkan

---

<sup>68</sup> Kurniawan, Mahrus Lutfi Adi dan Prawoto, Nano, 'Pertumbuhan ekonomi dan Penentuan Titik Ambang Batas Inflasi Indonesia' Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 15 No. 1 tahun 2014

<sup>69</sup> Sudarlan, 'Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia' Jurnal Eksis Vol 11 No 1 Tahun 2015

hubungan positif dan signifikan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda dihasilkan oleh penelitian Istiqamah et. Al<sup>72</sup> yang menunjukkan bahwa ketimpangan mempunyai pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga selama kurun waktu lima tahun penelitian ini, ( jangka pendek ) menunjukkan bahwa variable gini ratio atau ketimpangan tidak memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu bahwa penelitian ini menghipotesiskan bahwa:

**H3 *Gini Ratio* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.**

Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut diatas bahwa tesis ini juga menghipotesiskan variable secara simultan terhadap variable dependen. Dimana hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

**H4 *Local Taxes Revenue, Consumer Price Index* dan *Gini Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi periode 2015-2019.**

---

<sup>70</sup> Mopangga, Herwin,” Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo’ Jurnal Trikonomika Vol 10 No. 1 Tahun 2011

<sup>71</sup> Imbran Harijono dan Tone, Rusdiyanto L” Identifikasi dan Analisis Gini Ratio Kabupaten Gorontalo’

<sup>72</sup> Istiqamah, Syaparuddin dan Rahmadi, Slamet “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan ( STudi Provinsi-Provinsi di Indonesia )’ e- Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7 No.3 Tahun 2018

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Sebuah Pelajaran Dari Pelaksanaan Reformasi Pajak Di Indonesia Dan Vietnam Jurnal Borneo Administrator/Volume 13/No. 1/2017
- Abuyamin, O. (2015). Perpajakan: Dasar-Dasar Perpajakan, Kup, Pph, Ppn & Ppnbm, Pbb, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ppsp, Pengadilan Pajak, Pengantar Perpajakan Internasional. Bandung: Mega Rancage Press
- Ajeng Eka Farida<sup>1</sup>, Susan Novitasari<sup>2</sup>, Sita Histri Nareswari<sup>3</sup>, Musahadah<sup>4</sup>, Indrawati Yuhertiana<sup>5</sup> Reformasi Perpajakan Indonesia Dan Singapura: *Lüder's Contingency Model* Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, Volume 1, Nomer 2, Maret 2018 Hlm 64-86
- Adriansyah, Benny Gunawan. 2014. Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur. Badan Kebijakan Fiskal Vol 18, No 1, Maret 2014.
- Arfah Habib Saragih, Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Sikap, Vol. 3 (No. 1), Tahun 2018b, Halaman 17-27
- Arfah Habib Saragih, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2018a
- Bedoui, M. H. E. 2012. Shari'a-based Ethical Performance Measurement Framework. *Chair for Ethics and Financial Norm*. Universite Paris.
- Gebreegziabher S. 2018. Effects Of Tax And Government Expenditure On Economic Growth In Ethiopia. Springer, Singapore.
- Herry Sumardjito, Arief Daryanto, Musa Hubeis Dan Eriyatno Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Perpajakan (Studi Kasus Pada

- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus) Kajian  
Ekonomi Dan Keuangan Vol. 16 No.1 Tahun 2012
- Imam Ghozali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm  
Spss 23*, (Jakarta: Badan Penerbit Undip, Cet. 8,) H 160
- Jalata, D. M. 2014. The role of value added tax on economic growth of  
ethiopia.  
*Science, Technology and Arts Research Journal*, 3(1), 156-161.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm:  
Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.  
*Journal of Financial Economics*, October,1976, V. 3, No. 4, pp. 305-  
360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Keuangan  
Pemerintah Pusat.
- Lusy Suprajadi, *Reformasi Perpajakan*, Bina Ekonomi November 2000
- Mdanat, Metri Fayez., Et Al. 2018. Tax Structure And Economic Growth In  
Jordan, 1980-2015. Mohammed, M. O. and F. M. Taib. 2009. Testing  
the Performance Measured Based on Maqashid Framework Shariah  
(PPMS). Model on 24 Selected Islamic and Conventional  
Bank. Dipublikasikan. Paper. *International Islamic University of Malaysia  
(IIUM)*
- Mustopadidjaya, AR. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik,  
Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: LAN.
- Mutia, Evi Dan Nastha Musfirah, Pendekatan *Maqashid Shariah Index*  
Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara  
(*Maqashid Sharia Index Approach As Performance Measurement Of  
Sharia Banking In Southeast Asia*), Jurnal Akuntansi Dan Keuangan  
Indonesia Volume 14 Nomor 2, Desember 2017
- Nasucha, C. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik.  
Jakarta: Penerbit Grasindo.

- Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak *Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016*
- Risa Mayasari Dan I Made Narsa, Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No 2 Februari 2020 Hlmn. 414-427 *Doi: Ttps://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I02.P11*
- Soli, V.O., Harvey, S.K., & Hagan, E. 2008. Fiscal policy, private investment and economic growth: the case of Ghana. *Studies in Economics and Finance Vol. 25 No. 2, 2008 pp. 112-130.* Emerald Group Publishing Limited. DOI 10.1108/10867370810879438
- Stoilova, Desislava. 2017. Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. *Contaduría y Administracion, Volume 62, Issue 3, 2017, Pages 1041-1057, ISSN 0186-1042, https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006.*
- Venti Eka Satya\* Galuh Prila Dewi, Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2010 75 – 100.*